

SOAL APARTEMEN MALIOBORO CITY

Pemkab Tunggu SLF, Pertelaan dan SHM



KR-Istimewa

Sekda Sleman Susmiarto saat menerima perwakilan pemilik Apartemen Malioboro City.

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman telah melakukan berbagai upaya membantu menyelesaikan permasalahan pemilik Apartemen Malioboro City di Padukuhan Tambakbayan Caturtunggal Depok. Pemkab Sleman telah melakukan berbagai langkah dengan melakukan koordinasi dan permintaan informasi serta arahan dari instansi terkait yaitu OJK, KPKNL, KPP Pratama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta, proses permohonan legal opinion ke Kejaksaan Negeri Sleman. "Tanggung jawab secara tertulis dari masing-masing instansi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai

dasar koordinasi antara Pemkab Sleman dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang dialami para pemilik Apartemen Malioboro City saat ini," ungkap Sekda Sleman Susmiarto, Kamis (6/2) menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh perwakilan pemilik Apartemen Malioboro City di Kantor Setda Sleman.

Menurut Sekda, dokumen perizinan yang belum terselesaikan dalam permasalahan ini yaitu Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan SHM Sarusun (Satuan Rumah Susun). Sedangkan terkait dengan dokumen lingkungan yang menjadi salah satu syarat SLF, akan dipertimbangkan opsi jenis dokumen

lingkungan apabila sudah ada kejelasan dan arahan dari instansi terkait.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sleman Haris Martapa menambahkan, dalam penyelesaian permasalahan ini akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait agar seluruh informasi terkait tahapan penyelesaian perizinan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan permasalahan Apartemen. "Pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang memang berkompeten terkait pokok permasalahan dan tahapan proses masing-masing," ungkapnya.

Ditambahkan, Pemkab Sleman yang didukung penuh oleh Pemerintah Daerah DIY dapat bekerja sama lebih optimal dengan semua pihak dalam mencari solusi terkait masalah ini. "Pada prinsipnya, Pemerintah selalu siap untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan Apartemen Malioboro City agar dapat terselesaikan dengan baik, tidak berlarut larut dan tentunya membawa keadilan bagi semua pihak," jelas Haris. **(Has)-f**

TEBUS CUKUP TUNJUKKAN KTP

Petani Sleman Terima 16.960 Ton Pupuk Subsidi



KR-Istimewa

Petani Sleman tampak sumringah melihat hasil tanaman padi mereka tumbuh subur berkat pemupukan berimbang.

SLEMAN (KR) - Tahun 2025 ini, petani di Kabupaten Sleman mendapat alokasi pupuk subsidi hingga 16.960 ton. Jumlah alokasi tersebut mengalami kenaikan dibanding serapan tahun sebelumnya.

Untuk menebus pupuk bersubsidi tersebut, petani juga tidak perlu repot-repot lagi. Petani yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat menebus pupuk bersubsidi ke mitra kios hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Plt Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono, sistem pembelian pupuk bersubsidi kini telah berbeda. Petani yang su-

dah terdaftar di e-RDKK bisa langsung datang membeli pupuk bersubsidi di mitra kios yang ditunjuk. Mekanisme pembelian pupuk bersubsidi ini tidak lagi menggunakan kartu tani, melainkan cukup menunjukkan KTP.

"Jadi yang terpenting nama petani harus ada di e-RDKK itu, harus diinput oleh penyuluh. Agen yang ditunjuk sebagai penyalur pupuk bersubsidi sudah memiliki daftar. Petani tinggal datang, jika namanya

ada, ya sudah bisa langsung membeli. Tidak perlu kartu tani lagi," kata Suparmono di Sleman, Jumat (7/2).

Ditegaskan pula, ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani Sleman dipastikan aman. Pada tahun ini, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan 16.960 ton pupuk bersubsidi untuk 52.010 NIK petani di Kabupaten Sleman. Rinciannya sebanyak 9.490 ton pupuk urea dan 7.470 ton pupuk NPK. Jumlah tersebut lebih rendah dari 2024 lalu namun lebih tinggi dibanding serapan tahun lalu.

Menurut Suparmono, pada tahun 2024, serapan pupuk bersubsidi un-

tuk Urea 7.203 ton dari alokasi 9.642 ton atau prosentase serapan setara dengan 75 persen. Sedangkan untuk NPK terserap 6.042 ton dari alokasi 7.516 ton atau setara 80 persen.

DP3 Sleman meyakini dengan alokasi tersebut, ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman cukup aman. "Di pengencer yang ditunjuk oleh pemerintah, sejauh ini ketersediaannya aman. Sepertinya pemerintah komitmen untuk memenuhi pupuk sejak awal tahun, 1 Januari lalu. Kami sudah berkeliling mengecek pupuk dan memang ada. Jadi saya yakin aman," tandas Suparmono. **(Has)-f**

UTY Tambah Tiga Profesor Baru



KR-Istimewa

Tiga guru besar baru bersama Rektor UTY beserta jajarannya.

SLEMAN (KR) - Sebanyak 3 dosen di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas kenaikan Jabatan Akademik sebagai Guru Besar atau Profesor. SK tersebut diterima Rektor UTY dari Kepala LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing dosen UTY, yang berhasil memperoleh gelar Guru Besar.

Dosen UTY penerima SK tersebut adalah Prof Suhrman PhD dari Prodi Teknologi Informasi Program Magister UTY yang berhasil memperoleh gelar Guru Besar di bidang 'Data Warehouse and Mining'. Kemudian dosen Prodi Akuntansi Prof Dr Junaidi yang berhasil memperoleh gelar Guru Besar di Bidang Audit. Sedangkan Prof Dr Nur Wening dosen Prodi Ilmu Manajemen berhasil meraih gelar Profesor di bidang 'Manajemen SDM Strategik'.

"Dengan bertambahnya jumlah guru besar di UTY, kami berharap bisa semakin menunjukkan bentuk keseriusan atas pengelolaan proses pembelajaran

yang telah dilaksanakan oleh UTY selama ini," kata Rektor UTY Bambang Moertono Setiawan di kampus setempat, Mlati Sleman, Jumat (7/2).

Rektor mengungkapkan, prestasi akademik merupakan sebuah prestasi yang membanggakan, dan kembali menjadi bukti atas keseriusan UTY. Terutama dalam menjaga kualitas atas proses pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan Kampus. "Semoga ketiga guru besar baru UTY, dapat semakin produktif dalam berkarya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," ungkap Bambang.

Sementara Kepala LLDIKTI Wilayah V Prof Setyabudi Indartono PhD menyampaikan apresiasinya atas capaian ketiga dosen UTY yang berhasil memperoleh jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar. Momen itu bisa menjadi pemantik bagi dosen-dosen lainnya, untuk senantiasa dengan rajin dalam meningkatkan jabatan akademiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih saat ini, di UTY masih terdapat banyak kandidat dosen yang sangat memungkinkan untuk segera menjadi guru besar baru. **(Ria)-f**

TERIMA KONSULTASI HUKUM

Kejari Buka Layanan di Mal Pelayanan Publik



KR-Istimewa

Staf Kejari di MPP Sleman siap menerima layanan konsultasi masyarakat.

SLEMAN (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman membuka fasilitas ruang layanan publik di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman di Jalan Parasamya Tridadi. Fasilitas ini diperuntukkan masyarakat dan pemerintah dengan tujuan untuk mendekatkan layanan dalam mengurus berbagai kebutuhan berkaitan hukum dan perkara yang sedang ditangani. "Layanan ini merupakan

upaya langkah peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu program dari Kejari Sleman," kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sleman Murti Ari Wibowo, kemarin.

Dijelaskan, ada beberapa fasilitas layanan yang tersedia. Di antaranya konsultasi hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), penerimaan Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP), layanan tilang Dinas Perhubungan, layanan izin besuk tahanan, pembayaran denda subsidi, layanan upaya hukum, pembebasan bersyarat (PB) dan absen terdakwa.

"Selain bidang pidana, kejaksaan juga punya kewenangan sebagai jaksa pengacara negara. Sehingga apabila ditemukan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan surat kuasa khusus kejaksaan bisa mewakili Pemkab Sleman," ujar Wibowo.

Layanan dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat, untuk Senin - Kamis dibuka pukul 08.00 - 15.00 WIB, khusus Jumat dilayani pukul 08.00 - 14.00 WIB. "Kami siap melayani dengan mudah, cepat, dan transparan," sebutnya. **(Has)-f**

Kedaulatan Rakyat

EPAPER

www.kr.co.id



Berlangganan
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.